

## BAB III

### GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

#### A. Bank Indonesia

##### 1. Sejarah Singkat Kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara

Kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara merupakan cabang dari Bank Indonesia yang berpusat di Jakarta. Awalnya kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara bernama Kantor Bank Indonesia Cabang Medan mulai dibuka pada tanggal 30 Juli 1907 bersamaan dengan kantor cabang Tanjung Balai dan Tanjung Pura yang masing-masing di buka pada tanggal 15 Januari 1908 dan 3 Februari 1908. Kantor Bank Indonesia Cabang Medan merupakan Kantor Cabang De Javasche Bank yang ke-11. Pembukaan Kantor cabang Medan, Tanjung Balai dan Tanjung Pura sebagai kebutuhan untuk menunjang kebijaksanaan moneter pemerintah Hindia Belanda (atas usul De Javasche Bank) yang ketika itu memberlakukan *Guldenisasi* bagi Karesidenan Pantai Timur Sumatera.

Dengan Berkembangnya kegiatan Kantor Bank Indonesia Cabang Medan dan adanya pengaruh resesi dunia tahun 1930-an maka kantor cabang Tanjung Pura dan Tanjung Blai akhirnya ditutup. Pada Saat berdirinya, Kantor Bank Indonesia Cabang Medan menempati sebuah Bagunan sementara. Untuk gedung kantor yang permanen atas petunjuk pemerintah disediakan sebidang tanah di dekat *Esplande* (lapangan umum) yang pembangunannya diharapkan dapat dilaksanakan sebelum selesainya politik moneter "*Guldenisasi*" karesidenan pantai timur Sumatera.

Untuk persiapan pendirian kantor-kantor di Tanjung Balai dan Tanjung Pura kepada biro perancang Hulswit dimintakan untuk merancang pembangunan gedung kantor kedua tempat itu. Rencana pembangunan gedung kantor yang permanen bagi Kantor Bank Indonesia Cabang Medan

dilakukan bersamaan dengan perluasan tahap kedua gedung Kantor Pusat (Jakarta Kota) pada 1912 yang sekaligus juga merencanakan pembangunan gedung beberapa kantor cabang lainnya.

Gedung-gedung ini menunjukkan ciri arsitektur yang sama mengikuti ciri arsitektur Eropa pada zamannya. Pemimpin Cabang Medan yang pertama adalah L. Von Hemert dan pada tahun 1951 saat nasionalisasi pemimpin cabang adalah SF Van Musschenbroek dan pada saat Undang-Undang Bank Indonesia 1953 diberlakukan, pemimpin Cabang Medan adalah M. Planterna dan putra Indonesia pertama yang mengendalikan Bank Indonesia cabang Medan adalah M. Rifai, dan pemimpin kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara yang menjabat sekarang adalah Arif Budi Santoso.

## **2. Visi, Misi & Sasaran Strategis Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Utara**

### **Visi Kantor Bank Indonesia Medan**

Berperan aktif dalam pelaksanaan kebijakan moneter Bank Indonesia dalam mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah melalui pelaksanaan kegiatan operasional di bidang ekonomi, moneter, perbankan, sistem pembayaran secara efektif dan efisien dan peningkatan kajian ekonomi regional serta koordinasi dengan pemerintah daerah serta lembaga terkait.

### **Misi Kantor Bank Indonesia Medan**

1. Mencapai stabilitas nilai rupiah dan menjaga efektivitas transmisi kebijakan moneter untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.
2. Mendorong system keuangan nasional bekerja secara efektif dan efisien serta mampu bertahan dari gejolak internal dan eksternal untuk mendukung alokasi sumber pendanaan/pembiayaan dapat berkontribusi pada pertumbuhan dan stabilitas perekonomian nasional.

3. Mewujudkan sistem pembayaran yang aman, efisien, dan lancar yang berkontribusi terhadap perekonomian, stabilitas moneter dan stabilitas sistem keuangan dengan memperhatikan aspek perluasan akses dan kepentingan nasional.
4. Meningkatkan dan memelihara organisasi dan SDM Bank Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai strategi dan berbasis kinerja, serta melaksanakan tata kelola (*Governance*) yang berkualitas dalam rangka melaksanakan tugas yang diamanatkan Undang-Undang.

### **Sasaran Strategis Kantor Bank Indonesia Medan**

1. Informasi yang berkualitas dalam rangka mendukung kebijakan Kantor pusat dan Pengembangan Ekonomi di wilayah kerja.
2. Peningkatan sistem perbankan yang sehat dalam rangka mendukung pengembangan ekonomi daerah.
3. Kelancaran dan keamanan sistem pembayaran di wilayah kerja.
4. Pengelolaan keuangan Satker secara efektif dan efisien.
5. Mengoptimalkan kajian dan penyediaan informasi ekonomi di wilayah kerja

### **3. Tugas Pokok dan Produk Satuan Kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Utara**

Tabel Tugas Pokok dan Produk Pokok

Tugas Pokok	Produk-Produk
1. Mengembangkan Ekonomi daerah dan melaksanakan fungsi advisor pada kepala daerah.	1. Terlaksananya peran KPwDN sebagai Pendorong pengembangan Ekonomi Daerah dan Advisor kepada Kepala Daerah
2. Melaksanakan Regional Financial Surveillance	2. Terlaksananya Regional Financial Surveillance
3. Mengumpulkan data dalam rangka mendukung pengambilan keputusan di pusat maupun daerah setempat	3. Terkelolanya data yang efektif dan akurat dalam

<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Mengelola Distribusi uang</li> <li>5. Mengelola sistem Pembayaran</li> <li>6. Mengembangkan Financial Inclusion dan UMKM</li> <li>7. Melaksanakan Komunikasi Kebijakan</li> <li>8. Melaksanakan koordinasi terhadap pelaksanaan tugas KPwDN Kota/Kabupaten</li> <li>9. Mengelola Administrasi anggaran, logistik, SDM, Kesekretariatan, serta Manajemen kerja Satuan Kerja</li> </ol>	<p>rangka mendukung pengambilan keputusan di pusat maupun daerah setempatnya</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Terkelolanya distribusi uang di daerah secara efektif dan efisien</li> <li>5. Terkelolanya dukungan sistem pembayaran di daerah serta terlaksananya peran KPwDN sebagai katalis dalam transaksi pembayaran melalui elektronifikasi</li> <li>6. Terlaksana Program Pengembangan Financial Inclusion dan UMKM di daerah yang sejalan dengan target pencapaian inflasi dan pengembangan ekonomi daerah</li> <li>7. Terlaksananya Komunikasi daerah secara efektif dan berkontribusi positif terhadap citra Bank Indonesia di daerah.</li> <li>8. Terlaksananya koordinasi terhadap pelaksanaan tugas KPwDN Kota/Kabupaten</li> <li>9. Terkelolanya Fungsi Administrasi anggaran, logistik, SDM, Kesekretariatan, serta manajemen kinerja Satuan Kerja secara akuntabel serta transparan.</li> </ol>
---	---

Sumber: Bank Indonesia

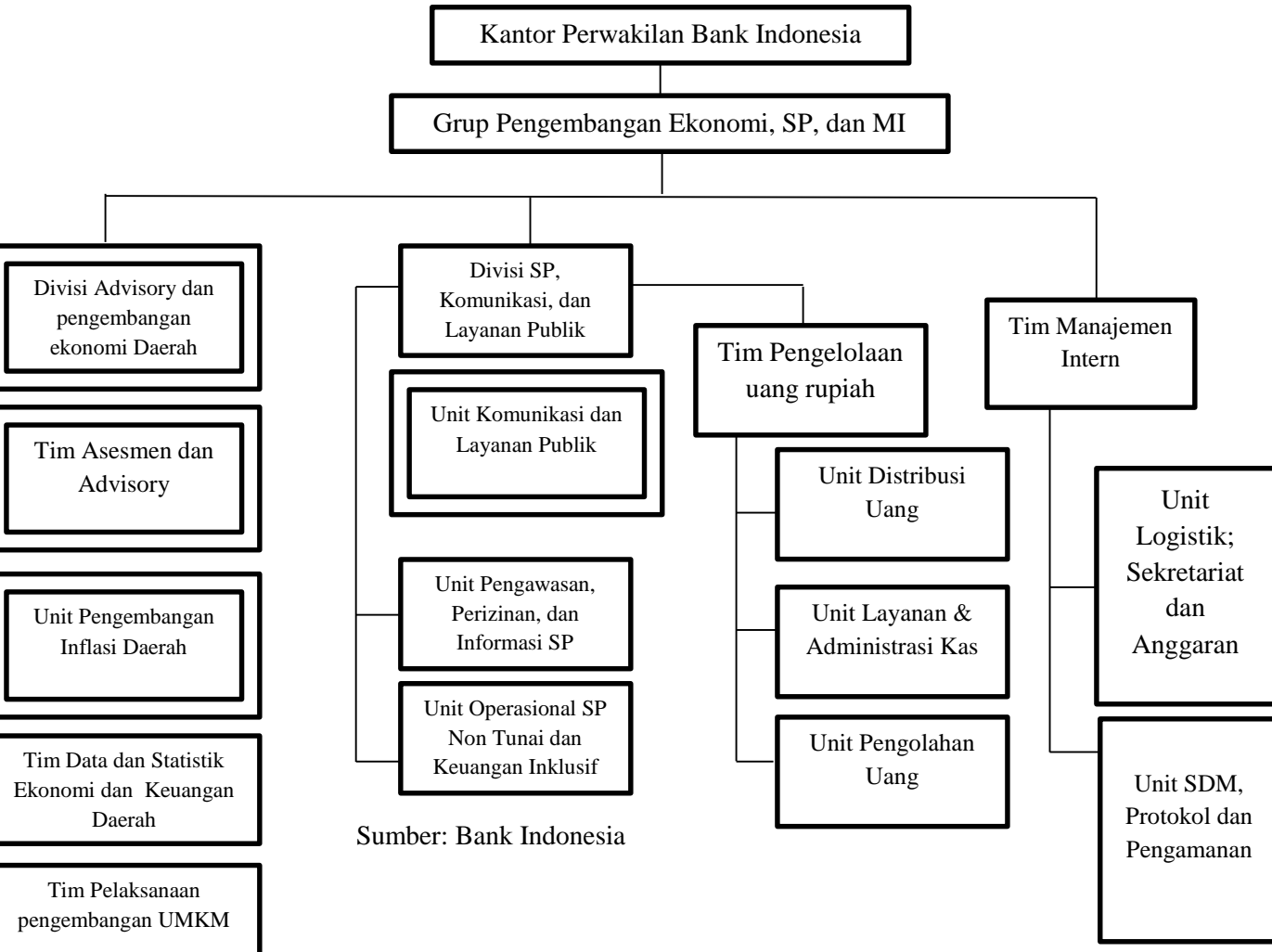
#### **4. Struktur Organisasi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Utara**

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara mempunyai 3 divisi dalam mengembangkan ekonomi Sumatera Utara. Adapun 3 Divisinya yaitu:

1. Divisi Advisory dan Pengembangan Ekonomi Daerah
  - a. Tim *Asesmen dan Advisory*
  - b. Tim Pengendalian Inflasi Daerah
  - c. Tim Data dan Statistik Ekonomi dan Keuangan Daerah
  - d. Tim Pelaksanaan pengembangan UMKM
2. Divisi SP, Komunikasi, dan Layanan Publik
  - a. Unit Komunikasi dan Layanan Publik
    - a) Tim pengelolaan Uang Rupiah
      - (1) Unit Distribusi Uang
      - (2) Unit Layanan & Administrasi Kas
      - (3) Unit Pengelolaan Uang
  - b. Tim Pengawasan, Perizinan, dan Informasi SP
  - c. Unit Operasional SP Non Tunai dan Keuangan Inklusif
3. Tim Manajemen Intern
  - a. Unit Logistik, Sekretariat, dan Anggaran
  - b. Unit SDM, Protokol, dan Pengamanan

Gambar Struktur Organisasi

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara



## B. Otoritas Jasa Keuangan

### 1. Sejarah Singkat Otoritas Jasa Keuangan Regional 5 Sumatera Utara

Otoritas Jasa Keuangan adalah sebuah lembaga pengawas jasa keuangan seperti industri perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun dan asuransi yang sudah harus terbentuk pada tahun 2010. Keberadaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ini sebagai suatu lembaga pengawas sektor keuangan di Indonesia perlu untuk diperhatikan, karena harus dipersiapkan dengan baik segala hal untuk mendukung keberadaan OJK tersebut. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 menyebutkan “Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat dengan OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang

mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. “

Dengan kata lain, dapat diartikan bahwa Otoritas Jasa Keuangan adalah sebuah lembaga pengawasan jasa keuangan seperti industri perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun dan asuransi. Didalam pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan. Oleh karena itu, dengan dibentuknya OJK diharapkan dapat mencapai mekanisme koordinasi yang lebih efektif didalam penanganan masalah-masalah yang timbul didalam sistem keuangan. Dengan demikian dapat lebih menjamin tercapainya stabilitas sistem keuangan dan adanya pengaturan dan pengawasan yang lebih terintegrasi. Berdasarkan Pasal 34 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (BI), pemerintah diamanatkan membentuk lembaga pengawas sektor jasa keuangan yang independen, selambat-lambatnya akhir tahun 2010. Lembaga ini bertugas mengawasi industri perbankan, asuransi, dana pensiun, pasar modal, modal ventura, dan perusahaan pembiayaan, serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat. Alasan pembentukan OJK ini antara lain makin kompleks dan bervariasinya produk jasa keuangan, munculnya gejala konglomerasi perusahaan jasa keuangan, dan globalisasi industri jasa keuangan. Jika dilihat sedikit kebelakang, sejarah pembentukan lembaga yang independen ini terbilang sulit dan penuh dengan tantangan. Bahkan untuk melahirkan pengawasan sistem keuangan ini pun membutuhkan waktu hingga 12 tahun sampai lembaga ini lahir. Adapun kronologis lahirnya OJK dapat dijabarkan sebagai berikut :

Pasca krisis ekonomi yang melumpuhkan industri perbankan pada tahun 1997- 1998, pemerintah langsung berbenah. Gagasan pembentukan otoritas dimasukkan dan menjadi perintah UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Didalam Pasal 34 disebutkan bahwa: Tujuan OJK

dibentuk antara lain agar keseluruhan kegiatan didalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel; mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Disamping itu tujuan pembentukan OJK ini agar BI fokus kepada pengelolaan moneter dan tidak perlu mengurus pengawasan bank karena bank itu merupakan sektor perekonomian. industri tertentu yang dipilih berdasarkan potensi, kemampuan serta pengalaman terutama di bidang minyak dan gas, kimia dan bangunan pabrik. Setelah keluarnya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang diundangkan tanggal 22 November 2011, pengaturan dan pengawasan sektor perbankan yang semula berada pada Bank Indonesia telah dialihkan pada Otoritas Jasa Keuangan. Dalam penjelasan Undang-undang OJK disebutkan bahwa dibutuhkan lembaga pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan yang lebih terintegrasi dan komprehensif agar dapat dicapai mekanisme koordinasi yang lebih efektif dalam menangani permasalahan yang timbul dalam sistem keuangan sehingga dapat menjamin tercapainya stabilitas sistem keuangan.

Dalam penjelasan tersebut diidentifikasi beberapa permasalahan yang melatarbelakangi dibutuhkannya sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi dalam suatu lembaga. Terjadinya proses globalisasi dalam sistem keuangan, pesatnya kemajuan di bidang teknologi juga inovasi finansial telah menciptakan sistem keuangan yang begitu kompleks, dinamis dan saling terkait antar subjektor keuangan baik dalam hal produk maupun kelembagaan. Disamping itu adanya lembaga jasa keuangan yang memiliki hubungan kepemilikan di berbagai subsektoral keuangan telah menambah kompleksitas transaksi dan interaksi antar lembaga jasa keuangan didalam sistem keuangan.

## **2. Visi dan Misi Otoritas Jasa Keuangan**



## **Visi Otoritas Jasa Keuangan**

Visi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum. Visi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum.

## **Misi Otoritas Jasa Keuangan**

1. Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel.
2. Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil.
3. Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

## **3. Struktur Organisasi Otoritas Jasa Keuangan**

Struktur Organisasi OJK Terdiri Atas:

- 1) Dewan Komisaris OJK
- 2) Pelaksana Kegiatan Operasional

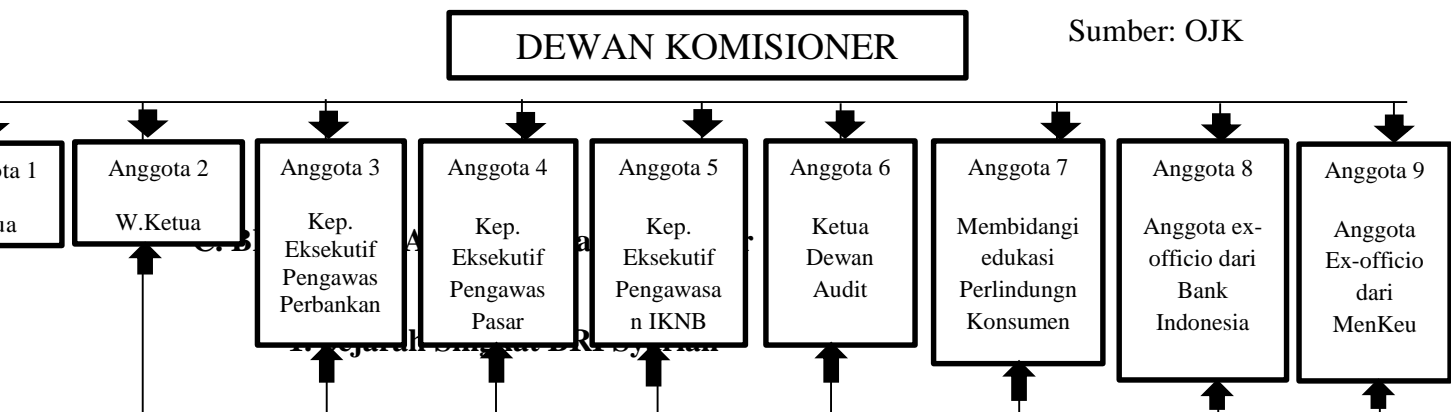
Struktur Dewan Komisasris Terdiri dari:

- a) Ketua merangkap anggota;
- b) Wakil Ketua sebagai Ketua Komite Etik merangkap anggota
- c) Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap anggota;
- d) Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal merangkap anggota;

- e) Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya merangkap anggota;
- f) Ketua Dewan Audit merangkap anggota;
- g) Anggota yang membidangi Edukasi dan Perlindungan Konsumen;
- h) Anggota Ex-officio dari Bank Indonesia yang merupakan anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia; dan
- i) Anggota Ex-officio dari Kementerian Keuangan yang merupakan pejabat setingkat Eselon I Kementerian Keuangan.

Pelaksana Kegiatan operasional OJK:

1. Ketua Dewan Komisioner memimpin bidang Manajemen Strategis I;
2. Wakil Ketua Dewan Komisioner memimpin bidang Manajemen Strategis II;
3. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan memimpin bidang Pengawasan Sektor Perbankan;
4. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal memimpin bidang Pengawasan Sektor Pasar Modal;
5. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya memimpin bidang Pengawasan Sektor IKNB;
6. Ketua Dewan Audit memimpin bidang Audit Internal dan Manajemen Risiko; dan
7. Anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen memimpin bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen.



Berawal dari akuisisi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007 dan setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui suratnya No.10/67/KEP.GBI/DpG/2008, maka pada tanggal 17 November 2008 PT. Bank BRI Syariah secara resmi beroperasi. PT. Bank BRI Syariah merubah kegiatan usaha yang semula beroperasi secara konvensional, kemudian diubah menjadi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah Islam. Dua tahun lebih PT. Bank BRI Syariah hadir mempersembahkan sebuah bank ritel modern terkemuka dengan layanan financial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna. Melayani nasabah dengan pelayanan prima (service excellence) dan menawarkan beragam produk yang sesuai dengan harapan nasabah dengan prinsip syariah.

Kehadiran PT. Bank BRI Syariah di tengah-tengah industry perbankan nasional dipertegas oleh makna pendar cahaya yang mengikuti logo perusahaan. Logo ini menggambarkan keinginan dan tuntunan masyarakat terhadap sebuah bank modern sekelas PT. Bank BRI Syariah yang mampu melayani masyarakat dalam kehidupan modern. Kombinasi warna yang digunakan merupakan turunan dari warna biru dan putih sebagai benang merah dengan brand PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Aktivitas PT. Bank BRI Syariah semakin kokoh setelah pada 19 Desember 2008 ditandatangani akta pemisahan Unit Usaha Syariah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk untuk melebur ke dalam PT. Bank BRI Syariah (proses spin off) yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009. Penandatanganan dilakukan oleh Bapak Sofyan Basir selaku Direktur Utama PT. Bank BRI (Persero) Tbk dan Bapak Ventje Rahardjo selaku Direktur Utama PT. Bank BRI Syariah. PT. BRI Syariah menjadi bank syariah ketiga terbesar berdasarkan asset PT. BRI Syariah tumbuh dengan pesat baik dari sisi asset, jumlah pembiayaan dan perolehan dana pihak ketiga. Fokus pada segmen menengah bawah,

PT. Bank BRI Syariah menargetkan menjadi bank ritel modern terkemuka dengan berbagai ragam produk dan pelayanan perbankan. Sesuai dengan visinya, saat ini PT. BRI Syariah merintis sinergi dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan memanfaatkan jaringan kerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai Kantor Layanan Syariah dalam mengembangkan bisnis yang berfokus kepada kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan kegiatan consumer berdasarkan prinsip Syariah.

## **2. Visi dan Misi PT. Bank BRI Syariah**

### **Visi Bank Syariah**

Menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna.

### **Misi Bank Syariah**

- a. Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam kebutuhan finansial nasabah.
- b. Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai dengan prinsip-prinsip syariah
- c. Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapan pun dan dimana pun.
- d. Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan menghadirkan ketentraman pikiran.

## **3. Produk-Produk PT. Bank BRI Syariah**

- a. Produk penghimpunan dana (Funding)

Bank tidak memberikan imbalan berupa bunga atas dasar dana yang disimpan oleh nasabah didalam Bank. Imbalannya diberikan atas dasar prinsip bagi hasil. Produk-produk perhimpunan dana meliputi:

1) Tabungan BRI Syariah iB

Tabungan BRI Syariah iB merupakan tabungan dari BRI Syariah bagi nasabah perorangan yang menggunakan prinsip titipan, dipersembahkan untuk anda yang menginginkan kemudahan dalam transaksi keuangan. Tabungan BRI Syariah iB memberikan ketenangan serta kenyamanan yang penuh nilai kebaikan serta lebih berkah karena pengelolaan dana sesuai syariah.

2) Tabungan Impian Syariah iB

Tabungan Impian Syariah iB adalah Tabungan berjangka dari BRI Syariah dengan prinsip bagi hasil yang dirancang untuk mewujudkan impian anda dengan terencana. Tabungan Impian BRI Syariah iB memberikan ketenangan serta kenyamanan yang penuh nilai kebaikan serta lebih berkah karena pengelolaan dana sesuai syariah serta dilindungi asuransi.

3) Tabungan Haji BRI Syariah iB

Tabungan Haji BRI Syariah iB dapat mewujudkan langkah terbaik dalam menyempurnakan ibadah. Tabungan Haji BRI Syariah iB dapat memberikan ketenangan, kenyamanan serta lebih berkah dalam penyempurnaan ibadah karena pengelolaan dana sesuai syariah.

4) Giro BRI Syariah iB

Giro BRI Syariah iB merupakan simpanan untuk kemudahan berbisnis dengan pengelolaan dana berdasarkan prinsip titipan (wadi'ah yad dhamanah) yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan cek/bilyet giro.

5) Deposito BRI Syariah iB

Deposito BRISyariah iB adalah produk investasi berjangka kepada deposan dalam mata uang tertentu. Keuntungan: dana dikelola dengan prinsip syariah sehingga shahibul maal tidak perlu khawatir akan pengelolaan dana.

b. Produk Penyaluran dana (Lending)

Adapun Produk Penyaluran dana yang ditawarkan oleh Bank BRI Syariah KC Pematangsiantar sebagai berikut:

1) Gadai BRI Syariah iB

Gadai BRI Syariah iB Hadir untuk memberikan solusi memperoleh dana tunai untuk memenuhi kebutuhan dana mendesak ataupun untuk keperluan modal usaha dengan proses cepat, mudah, aman dan sesuai syariah untuk ketentraman anda. Manfaat: pilihan tepat, penuh manfaat serta lebih berkah karena pembiayaan sesuai syariah.

2) KKB BRI Syariah iB

Pembiayaan Kendaraan Bermotor menggunakan prinsip jual beli (murabahah), adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh nasabah dan Bank.

3) KPR BRI Syariah iB

Pembiayaan Kepemilikan Rumah kepada perorangan untuk memenuhi sebagian atau keseluruhan kebutuhan akan hunian dengan menggunakan prinsip jual beli (murabahah) dimana pembayarannya secara angsuran dengan jumlah angsuran yang telah ditetapkan dimuka dan dibayar setiap bulan.

4) KLM BRI Syariah iB

Kepemilikan Logam Mulia menggunakan prinsip jual beli (murabahah) dengan akad Murabahah bil Wakalah. Pembiayaan ini dapat membantu nasabah dalam mewujudkan mimpi memiliki emas logam mulia dengan lebih mudah.

5) Pembiayaan Umroh BRI Syariah iB

Produk Pembiayaan Umrah BRISyariah iB menggunakan prinsip akad jual beli manfaat/jasa (Ijarah Multijasa). Produk ini dapat membantu dalam menyempurnakan niat ibadah dan berziarah ke Baitullah.

6) KMG BRI Syariah iB

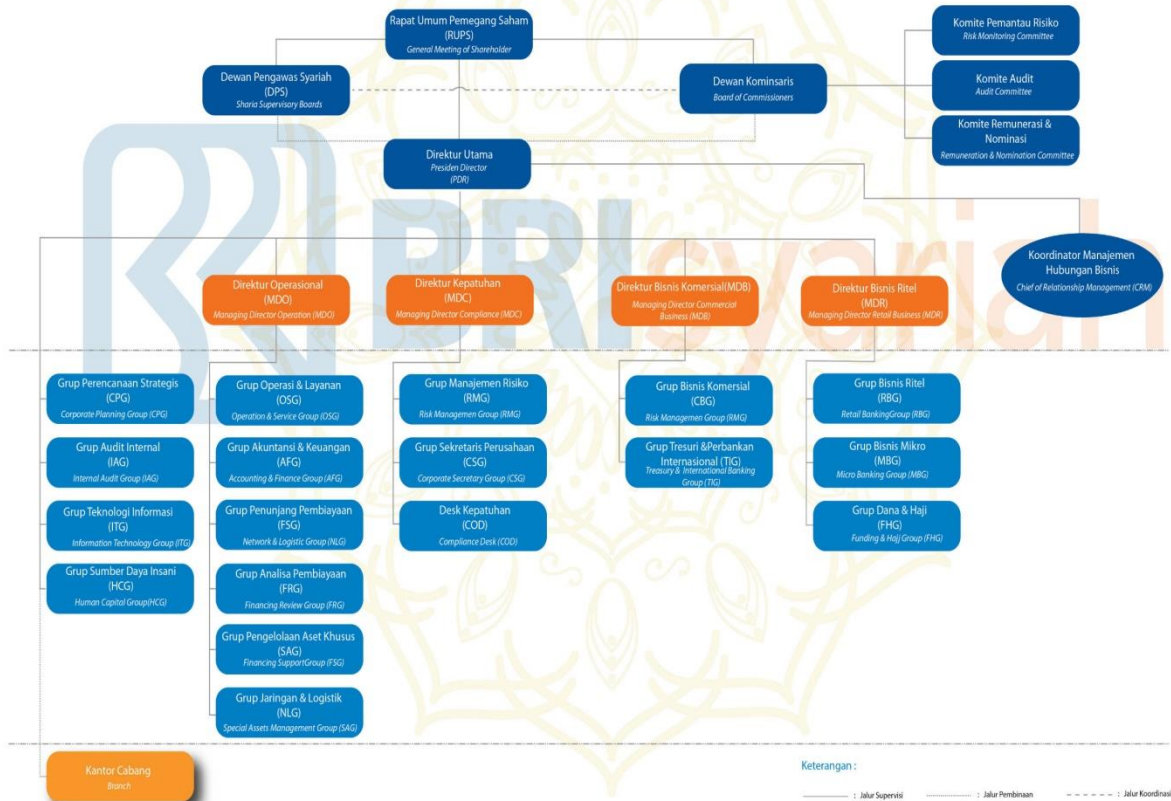
Salah satu produk untuk memenuhi kebutuhan karyawan khususnya karyawan dari perusahaan yang bekerjasama dengan PT.Bank BRI Syariah dalam Program Kesejahteraan Karyawan (EmBP), dimana produk ini dipergunakan untuk berbagai keperluan karyawan Program Kesejahteraan Karyawan (EmBP).

#### **4. Struktur Organisasi PT. Bank BRI Syariah KC Pematangsiantar**

Setiap organisasi mempunyai tujuan yang telah direncanakan dan ditetapkan. Langkah utama dalam mencapai tujuan tersebut adalah dengan merencanakan dan merumuskan struktur organisasi yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan organisasi. Agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai, maka orang yang bekerja dalam suatu organisasi harus mengetahui dan mengerti akan tugas, tanggungjawab dan wewenangnya. Untuk menggambarkan secara sistematis hubungan kerja antar unsur-unsur organisasi maka harus ada struktur organisasi yang jelas. Adapun struktur organisasi pada Bank BRI Syariah KC Pematangsiantar adalah sebagai berikut:

# STRUKTUR ORGANISASI

Organization Structure



Sumber: BRI Syariah KC Pematangsiantar